



## *Artikel*

# **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

**Nila Wahyuni<sup>1,\*</sup>**

<sup>1</sup> Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat

\* Korespondensi : [nilawahyuni@soc.unand.ac.id](mailto:nilawahyuni@soc.unand.ac.id)

### **Abstrak**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lewat Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018. Hasil evaluasi tahun 2021 menunjukkan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori baik dengan nilai 2,69 dalam skala 5. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan SPBE di Provinsi Sumatera Barat yang dibatasi pada Aplikasi dan Website dan Kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi dengan analisis model interaktif sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Sumatera Barat sudah memiliki banyak layanan administrasi dan layanan publik yang berbentuk elektronik. Adapun dari segi kelembagaan didapatkan hasil bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi leading sector pengelola SPBE. Padahal dalam Peraturan Daerah untuk mewujudkan keterpaduan dan keselarasan Pengelolaan SPBE akan dibentuk Komite Teknologi Informasi Daerah dan Government Chief Information Officer yang masih belum terealisasi sampai sekarang. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa implementasi SPBE di Provinsi Sumatera Barat masih dalam proses pematangan agar dapat dimanfaatkan secara massif sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang benar-benar berbasis elektronik.

**Kata Kunci:** : *Implementasi Kebijakan; Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Aplikasi dan Website; Kelembagaan.*

### **Abstract**

The Provincial Government of West Sumatra became the first province in Indonesia to have a Regional Regulation on Electronic-Based Government Systems (SPBE) through Regional Regulation Number 20 of 2018. The results of the 2021 evaluation showed that West Sumatra Province was in the good category with a score of 2.69 on a scale of 5. This study aims to see the implementation of SPBE in West Sumatra Province which is limited to Applications and Websites and Institutions. This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques are interviews, observations, and documentation studies with interactive model analysis as a data analysis technique. The results of the study show that the Government of West Sumatra already has many administrative services and public services in electronic form. As for the institutional aspect, it was found that the Office of Communication and Informatics (Diskominfo) became the leading sector managing SPBE. Whereas in the Regional Regulation to realize the integration and harmony of SPBE Management a Regional Information Technology Committee and a Government Chief Information Officer will be formed, which has not been realized until now. Therefore it can be concluded that the implementation of SPBE in West Sumatra Province is still in the process of being mature so that it can be used massively as part of a truly electronic-based government system.

**Keywords:** *Policy Implementation; Electronic-Based Government System; Applications and Websites; Institutional.*

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

---

### 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menuntut pemerintah untuk ikut berkembang di dalam menyelenggarakan tata negara dan penyampaian layanan publik (Aziz et al., 2021; Muliawaty & Hendryawan, 2020; Ramli & Cahyadini, 2019; Nugraha, 2018; Supriyanto, 2016). Pemerintah, dalam hal ini, menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas (Amri et al., 2022; Khaidarmansyah & Ridwan Saifuddin, 2022; Pratama & Meigawati, 2021; Tanaamah et al., 2021; Qotrunnisa, 2021; Awaludin, 2019).

Provinsi Sumatera Barat kemudian menjadi Provinsi yang pertama kali menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut. Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mendapatkan nilai indeks SPBE sebesar 2,69 dengan kategori baik.

Sejauh ini capaian pengembangan SPBE di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2017, telah membangun 143 website dan aplikasi. Namun, berdasarkan hasil monitoring yang rutin dilakukan oleh Tim Diskominfo, dari 143 aplikasi dan website tersebut, terdapat 46 diantaranya yang tidak dimanfaatkan oleh OPD yang meminta aplikasi tersebut. Peran masing-masing OPD di provinsi Sumatera Barat ini juga akan mempengaruhi pengimplementasian SPBE di Provinsi Sumbar baik di tingkat kabupaten/kota.

Namun begitu, berdasarkan menpan.go.id dan hasil evaluasi penerapan SPBE di provinsi Sumbar ditemukan berbagai permasalahan dalam penerapan SPBE Provinsi Sumbar masih terdapat beberapa kekurangan seperti; kurangnya kolaborasi antar seluruh OPD di lingkup pemerintahan provinsi Sumbar, tata kelola yang tidak terpadu, pemanfaatan TIK yang kurang maksimal, kompetensi ASN yang belum memadai, infrastruktur layanan yang belum memadai dan layanan publik yang belum dapat diakses dengan mudah setiap saat. Oleh sebab itu artikel ini akan membahas secara mendalam implemantasi Kebijakan Provinsi Sumatera Barat tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Beberapa kajian literatur yang penulis lakukan mendapatkan bahwa penelitian sejenis sudah banyak dilakukan. Namun secara spesifik yang melakukan penelitian tentang fokus dan lokus yang sama belum ada. Pratiwi et al., (2020) lebih melihat kajian evaluasi kebijakan. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa belum berjalan atau berfungsi secara baik dan optimal dalam penerapan e-government atau SPBE.

Anugrah et al., (2022) melakukan hal yang kurang lebih sama dengan penelitian sebelumnya. Namun hasil yang di dapatkan sedikit berbeda. Artikel ini menemukan bahwa belum adanya peraturan walikota yang menjadi pedoman teknis bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan SPBE membuat penerapan SPBE tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto et al., (2021) di mana penelitian menjelaskan tentang pentingnya pembuatan peta rencana SPBE dengan terlebih dahulu untuk menyesuaikan kondisi dari SPBE di Banten yang masih mendapatkan evaluasi penilaian dengan tingkat yang "cukup". Penelitian yang dilakukan oleh Bouthy et al., (2019) menjelaskan bahwa proses evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah Kota Gorontalo yang dilaksanakan dalam penelitian ini berjalan dengan cukup baik, hal ini

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

---

dibuktikan dengan hasil pengukuran tingkat kematangan SPBE yang memperoleh total nilai indeks 2.88 dengan predikat “BAIK”.

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Khaidarmansyah & Saifuddin (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terwujudnya sistem yang saling berintegrasi dan juga penerapan Integrasi pada provinsi Lampung. Beberapa penyebab antara lain; kebijakan tata kelola masih pada level rintisan, pemahaman Pemerintah Provinsi Lampung yang masih rendah terkait pentingnya SPBE, serta minimnya SDM ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi secara kualitas. Terakhir, penelitian Susilo et al., (2019) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang belum bisa melaksanakannya secara optimal SPBE untuk memaksimalkan perkembangan ekonomi di Kabupaten Semarang. Kendala implementasi yang dihadapi oleh di Kabupaten Semarang dalam penerapan SPBE adalah pada indikator komunikasi, sumberdaya dan disposisi. Terkait penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas maka untuk membedakan dengan penelitian tersebut maka penelitian ini akan fokus pada implementasi pada bagian Aplikasi dan Website, Kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia. Bagian-bagian tersebut menjadi beberapa bagian utama di dalam Bab II tentang pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebab bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa ataupun aktivitas. Hal itu sejalan dengan definisi penelitian kualitatif yang disampaikan oleh Sukmadinata (2009) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan maupun menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial serta sikap, kepercayaan, dan persepsi dari orang ataupun kelompok. Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif sebab pada awalnya data akan dikoleksi, direduksi, didisplay untuk mencari gambaran utuh dari suatu peristiwa.

Penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 2022. Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan karena Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat merupakan leading sector pelaksanaan SPBE di Provinsi Sumatera Barat. Namun begitu, kami juga melakukan triangulasi sumber untuk melakukan validasi data yang didapat dengan mewawancara pihak-pihak lain baik pegawai maupun masyarakat yang merasakan manfaat dalam penerapan SPBE di Provinsi Sumatera Barat.

Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Penggalian sumber data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi yang dilakukan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan sumber data sekunder dilakukan dengan telaah dokumen, website dan lainnya. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan model interaktif sebagai teknik analisis data.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Layanan SPBE Provinsi Sumatera Barat

Penerapan SPBE di Provinsi Sumatera Barat ditandai dengan dibangunnya layanan-layanan SPBE baik yang berbantuan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik maupun layanan publik berbasis elektronik. Ruang lingkup dari kedua layanan tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Layanan

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud kebijakan tersebut yaitu layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Sedangkan Layanan publik berbasis elektronik yaitu layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka Provinsi Sumatera Barat sudah mengembangkan aplikasi dan website yang menunjang dua bentuk layanan tersebut. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pegawai di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat yaitu;

*“Sejauh ini penerapan SPBE di sumbar, baik itu dalam bentuk aplikasi sudah menggunakan aplikasi ABON yang digunakan untuk kepegawaian atau untuk merekap kehadiran pegawai, aplikasi tersebut sudah ada di playstore. Selain itu, untuk pendataan pegawai ada simpeg namanya, dan dikelola oleh PKD. Karena kominfo kan sebagai penyedia layanan, jadi untuk aplikasi itu sendiri dikelola oleh OPD masing-masing. Untuk pelayanan masyarakat itu sudah ada aplikasi 17 surek (surat elektronik), dan juga ada namanya sipsakato (Aplikasi untuk perizinan) itu adalah dari goverment ke masyarakat”*

Selanjutnya, artikel ini akan mendeskripsikan tentang layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik maupun layanan publik berbasis elektronik dalam bentuk aplikasi dan website yang sudah dikembangkan oleh Provinsi Sumatera Barat. Adapun aplikasi dan website tersebut antara lain.

### 3.1.1 Abon Sumbar (Absensi Online Sumatera Barat)

Abon Sumbar merupakan salah satu aplikasi layanan SPBE yang berbentuk layanan administrasi pemerintahan atau dalam istilah lain disebut sebagai *Government-to-government* (G2G). Abon Sumbar merupakan absensi secara online yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai di semua OPD di Provinsi Sumatera Barat. Abon Sumbar ini berguna untuk melakukan kontrol terhadap kedisiplinan pegawai, baik itu kehadiran, jadwal hadir, jadwal pulang, dan izin pegawai di lingkup pemerintahan. Aplikasi ini nantinya dapat merekap absensi kehadiran para pegawai maupun staf di OPD yang menggunakan yang nantinya akan dijadikan sebagai bagian dari perhitungan pemberian Tunjangan “Tambahan Penghasilan Pegawai” atau TPP. Layanan Abon Sumbar terdiri dari layanan yang berbentuk aplikasi dan website. Aplikasi abon sumbar ini memiliki 3 fitur utama yakni:

#### 1) Home

Fitur ini merupakan halaman utama dari aplikasi dimana disini terdapat informasi terkait jam absen hari terkini dan tempat atau lokasi pegawai tersebut saat mengambil absen.

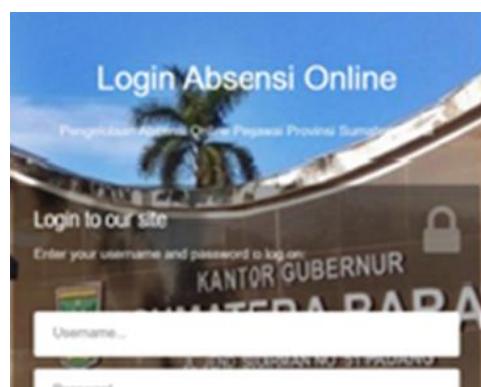
#### 2) Agenda

Fitur Agenda ini berguna untuk menangkap izin pegawai

#### 3) Riwayat

Pada fitur riwayat ini dapat digunakan untuk melihat rekап absensi pegawai perbulan.

**Gambar 1.** Abon Sumbar dalam bentuk Website (kiri) dan Abon Sumbar dalam bentuk Aplikasi pada OS Android (kanan)



## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

---

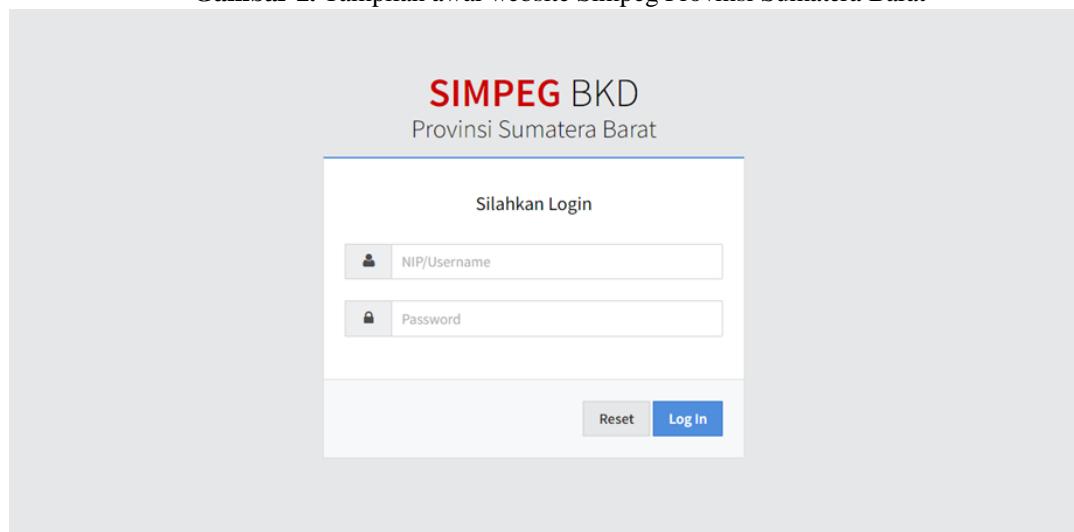
Namun begitu aplikasi Abon Sumbar masih perlu beberapa perbaikan. Dilihat dari rating yang ada di google playstore maka Abon Sumbar mendapatkan rating 4.0 dari 5. Beberapa keluhan dari pengguna berupa aplikasi yang sering error dan lokasi pengambilan absen yang tidak ditemukan perlu diperbaiki lagi agar penerapan Abon Sumbar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna.

### 3.1.2 Simpeg (Sistem Kepegawaian)

Simpeg adalah salah satu bentuk layanan yang juga berbentuk layanan administrasi pemerintahan. Layanan ini berbasis web yang digunakan untuk mengolah data kepegawaian. Adapun Data yang ada pada aplikasi Simpeg seperti Fitur Data Pegawai yang dapat menampilkan semua detil data (data pribadi, keluarga, riwayat pendidikan, riwayat pangkat dan riwayat jabatan akademik, riwayat jabatan struktural, riwayat penelitian serta riwayat pengabdian masyarakat, penghargaan, sertifikat, pelatihan, tugas kelembagaan dan sebagainya). Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk mengolah data-data pegawai. Keuntungan lain dari penggunaan yaitu Simpeg juga memudahkan atasan untuk melakukan fungsi pengawasan dalam kepegawaian karena sistem ini dapat menunjukkan sasaran kerja pada tiap diri seorang pegawai (SKP).

Penerapan Simpeg Sumbar dari hasil penelitian yang didapatkan sudah mendapatkan respon positif dari pengguna. Beberapa hal yang positif yaitu penggunaan yang relatif mudah / user friendly dan keamanan data dari Simpeg cukup bagus. Namun begitu, kenyamanan di dalam penggunaan masih perlu diperbaiki lagi terutama untuk pengguna yang berumur di atas lima puluh tahunan.

**Gambar 2.** Tampilan awal website Simpeg Provinsi Sumatera Barat



## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

### 3.1.3 SIPSAKATO

SIP SAKATO adalah salah satu website yang tujuannya memberikan layanan publik berbasis elektronik dalam bentuk perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Aplikasi ini dikembangkan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dan kolaborasi dengan Diskominfo Provinsi Sumatera Barat. Aplikasi ini pertama kali dilaunching pada 31 Agustus 2017. Pada saat itu Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno, menjelaskan bahwa “SIP Sakato diharapkan dapat meningkatkan tingkat pelayanan terhadap masyarakat dan investasi. Hal ini mengingat pentingnya sistem informasi dalam mencapai *good government* dan *clean governance*” (Sumbarprov.go.id diakses 13 Januari 2023). Setelah 5 (lima) tahun, SIP SAKATO menjadi salah satu inovasi layanan yang membuat Provinsi Sumatera Barat menjadi satu dari empat provinsi terbaik di dalam pelayanan 1 pintu pada tahun 2021 (<https://langgam.id/bersaing-dengan-4-provinsi-sumbar-masuk-nominasi-terbaik-dalam-pelayanan-1-pintu/> diakses 12 Januari 2023)

Adapun Prosedur dalam penggunaan SIP SAKATO terlebih dahulu tiap individu masyarakat harus mendaftarkan dan membuat akun untuk dapat mengurus perizinan. Setelah memiliki akun SIP SAKATO masyarakat dapat melakukan pengurusan izin dengan mengklik menu permohonan izin setelah itu individu masyarakat akan diarahkan untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan permohonan izin tersebut. Terdapat 19 (sembilan belas) bidang pelayanan dan non pelayanan yang dilayani pada website ini yaitu: 1) Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2) Energi dan Sumber Daya Mineral, 3) Kehutanan, 4) Kesehatan, 5) Ketenagakerjaan, 6) Pemukiman dan Perumahan, 7) Pendidikan, 8) Penanaman Modal, 9) Perhubungan, 10) Perikanan dan Kelautan, 11) Perindustrian dan Perdagangan, 12) Peternakan dan Kesehatan Hewan, 13) Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, 14) Sosial, 15) Lingkungan Hidup, 16) Koperasi dan UMKM, 17) Kebudayaan dan Pariwisata, 18) Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, dan 19) Kesatuan Bangsa dan Politik.

**Gambar 3.** Tampilan awal website SIP SAKATO Provinsi Sumatera Barat (Dapat diakses di <https://sipsakato.sumbarprov.go.id/>)

NO	NOMOR PENDAFTARAN TANGGAL DAFTAR ASAL PERMOHONAN	NAMA PEMOHON	JENIS IZIN	STATUS
1	0023724401020203124 2023-02-07 Online	Kieisha Kachmadilla	[Rekomendasi Penelitian]	Izin Disetujui
2	0021824401020203124 2023-02-07 Online	Dina-Kahayu Eliza Prima	[Rekomendasi Penelitian]	Izin Disetujui
3	0021924401020203124 2023-02-06 Online	Febri Arrahim	[Rekomendasi Penelitian]	Izin Disetujui
4	0022024401020203124 2023-02-06 Online	Dendi Bahri	[Rekomendasi Penelitian]	Izin Disetujui
5	0022224401020203124 2023-02-06 Online	Yoga Aisyah	[Rekomendasi Penelitian]	Izin Disetujui

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

---

### 3.1.4 SUREK (Surat Elektronik)

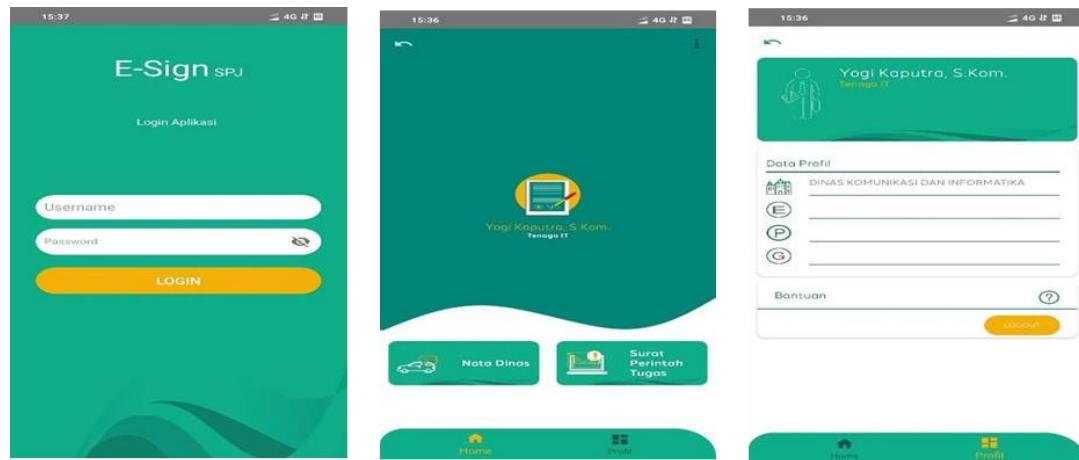
Surek adalah sebuah Aplikasi persuratan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Sumatera Barat untuk mempermudah proses pengurusan surat-surat secara online mulai dari pembuatan surat, pengecekan ulang dan koreksi kesalahan surat sampai surat tersebut dikirim ke OPD yang dituju di lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.



Selain berbentuk website, SUREK juga dikembangkan dalam aplikasi berbasis android yang tujuannya untuk memudahkan pemeriksaan surat perjalanan dinas kapanpun dan dimanapun. SUREK memiliki fitur: 1) Pemeriksaan catatan dinas, 2) Pemeriksaan surat tugas, 3) Pemberitahuan surat masuk, dan 4) Riwayat akhir pengajuan. Aplikasi ini telah mendukung hasil berupa surat berbasis elektronik dan tanda tangan digital.

**Gambar 5.** Tampilan Aplikasi SUREK Provinsi Sumatera Barat

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



### 3.1.5 siMAYA (Sistem Administrasi Perkantoran Maya)

Aplikasi siMAYA merupakan salah satu aplikasi e-office yang juga berbentuk layanan administrasi pemerintahan. Aplikasi ini digunakan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memberikan administrasi pemerintahan karena aplikasi ini dapat diakses dimana saja walaupun pimpinan tidak berada di kantor sehingga tidak perlu disposisi kepada pejabat lain. Aplikasi siMAYA ini telah disempurnakan oleh aplikasi e-office sebelumnya seperti SUREK sehingga sangat berguna dalam pengarsipan surat serta meningkatkan efektivitas kerja karena setiap proses surat dapat dicek kapan saja tanpa harus datang langsung ke intansi yang menjadi tujuan.

### 3.1.6 Layanan lainnya

Pemerintah Sumatera Barat juga telah mengembangkan beberapa aplikasi lainnya dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selain aplikasi-aplikasi yang sudah dibahas di atas. Beberapa aplikasi yang ada banyak yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi android. Aplikasi aplikasi tersebut antara lain dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini.

**Gambar 6.** Aplikasi Layanan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di *Google Playstore*

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



### 3.2. Kelembagaan dalam Bentuk Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah

Pengembangan aplikasi atau website dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berada di bawah Dinas Komunikasi, dan Informasi Provinsi Sumatera Barat. Sehingga setiap pengembangan aplikasi atau web yang dilakukan oleh OPD di Provinsi Sumatera Barat akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, dan Informasi Provinsi Sumatera Barat. Secara teknis, Diskominfo Sumbar terlebih dahulu akan melihat kelebihan maupun kelemahan dari Aplikasi yang disulkan dan hendak dikembangkan oleh OPD terkait. Kominfo akan melihat manfaat dan dampak dari aplikasi atau website yang direkomendasikan apakah dapat mempermudah akses layanan kepada masyarakat maupun layanan administrasi pemerintahan. Jika dalam hal ini pihak OPD berhasil menunjukkannya melalui diskusi bersama Kominfo Sumbar maka pihak Kominfo Sumbar akan memulai perancangan hingga nantinya peluncuran aplikasi untuk organisasi perangkat daerah tersebut.

*“Iya, setiap OPD harus mengajukana surat dulu, jadi di surat itu nanti kami minta lampirkan KAK (Kerangka Acuan Kerja), di KAK itu nanti mereka menjelaskan mereka maunya aplikasi seperti apa, dan yang memakai aplikasinya siapa, setalah suratnya masuk kesini baru kami membuat undangan, nanti tindak lanjut dari undangan tersebut mereka kami ajak pembahasan kesini, setelah pembahasan nanti dikerjakan, setelah aplikasi berjalan 75 persen, mereka akan kami undang lagi untuk menyamakan rapat yang pertama, sesuai nggak dengan permintaan yang mereka ajukan sama hasil jadinya, kenapa 75 persen, ya nanti setelah jadikan sedangkan aplikasi tidak sesuai dengan permintaan maka bisa dilakukan perombakan ulang” (Wawancara dengan salah seorang pegawai Diskominfo Sumatera Barat, 23 November 2022)*

Adapun beberapa bentuk koordinasi yang pernah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa instansi baik yang berada di level Pemerintah provinsi ataupun di level pemerintah kota/kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dalam Peningkatan Layanan Pendidikan

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

---

Diskominfo sumbar dan Dinas pendidikan Provinsi Sumbar berkerja sama dalam membuat sebuah website PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang merupakan sebuah situs website dalam penerimaan peserta didik baru berbasis online. Website ini memuat informasi terkait pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi, zonasi, prestasi, serta panduan berupa tahap atau alur pendaftaran untuk siswa Dapodik dan siswa Non Dapodik. Selain itu, Di website PPDB ini juga memiliki kontak pengaduan di tiap wilayah atau kota di Provinsi Sumatera Barat jika di tiap daerah mengalami kendala dapat langsung menghubungi pihak daerah terkait. Dari sini dapat dilihat koordinasi yang dibangun antar Kominfo Sumbar dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan layanan yang cukup baik untuk masyarakat dengan mengembangkan sebuah website untuk jalur pendaftaran siswa baru dengan berbasis online.

b) Koordinasi dalam Peningkatan Layanan Perizinan

DPMPTSP Provinsi Sumbar berkoordinasi dengan Kominfo Sumbar sebagai penyedia yang meluncurkan suatu website SIPSAKATO ini, pelayanan yang diurus disini meliputi, perizinan berusaha dan lain sebagainya yang menjadi tugas pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Keberadaan website SIPSAKATO sebagai bentuk kerja sama keduanya dalam membuat dokumen perizinan secara online dan setelah itu cukup menunggu tiga hari untuk surat izin tersebut dapat dicetak.

c) Koordinasi dalam Peningkatan Layanan Pembayaran Pajak

Kolaborasi Diskominfo dengan samsat yaitu pada sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai upaya dalam memaksimalkan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui media-media promosi dan sosialisasi dalam menyampaikan infomasi dan publikasi ke masyarakat. Pelaksanaan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat seperti yang sudah dituliskan di atas belum secara utuh melaksanakan norma kebijakan yang sudah ditentukan. Pada pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan pengelola SPBE, Gubernur membentuk Komite Teknologi Informasi Daerah dan Government Chief Information Officer. Namun begitu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini belum memiliki dua lembaga tersebut.

Padahal di dalam Pasal 20 dan 21 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan fungsi dari Komite Teknologi Informasi Daerah dan Government Chief Information Officer sangat Vital di dalam pengembangan SPBE. Keberadaan Komite Teknologi Informasi Daerah dapat 1) mewadahi aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah, dan 2) melakukan pengkajian, evaluasi, dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di daerah. Adapun anggota dari Komite Teknologi Informasi Daerah terdiri dari; 1) Pemerintahan Daerah, 2) Akademisi, 3) Pelaku Usaha, dan 4) Tokoh Masyarakat. Sedangkan Government Chief Information Officer berfungsi sebagai koodinatator perencanaan dan pelaksanaan inisiatif TIK provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi TIK. Oleh sebab itu untuk penerapan SPBE yang efektif, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu untuk mengadakan kedua lembaga tersebut.

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

---

### 5. Kesimpulan

Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah tentang SPBE melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018. Hasil evaluasi tahun 2021 menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori baik dengan nilai 2,69 dalam skala 5. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seperti Abon Sumbar (Absensi Online), Simpeg (Sistem Kepegawaian), SIPSAKATO (Aplikasi Perizinan), SUREK (Surat Elektronik), dan siMAYA (Sistem Administrasi Perkantoran Maya). Layanan-layanan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan administrasi pemerintahan. Dalam hal kelembagaan, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi *leading sector* dalam mengelola SPBE. Namun, menurut Peraturan Daerah, untuk mencapai keterpaduan dan keselarasan dalam pengelolaan SPBE, akan dibentuk Komite Teknologi Informasi Daerah dan *Government Chief Information Officer* yang belum terealisasi hingga saat ini. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu tantangan dalam implementasi SPBE di Provinsi Sumatera Barat. Komite Teknologi Informasi Daerah bertugas untuk mewadahi aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada setiap Perangkat Daerah. Sedangkan *Government Chief Information Officer* berfungsi sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan inisiatif TIK provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi TIK. Dengan demikian, pembentukan Komite Teknologi Informasi Daerah dan *Government Chief Information Officer* dianggap penting untuk mencapai keterpaduan dan keselarasan dalam pengelolaan SPBE agar tujuan dari kebijakan SPBE dapat tercapai dengan optimal.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Hidayatul Fajri yang telah banyak membantu di dalam melakukan penulisan artikel ini.

### Referensi

1. Amri, U., Adianto, & As'ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12201–12207.
2. Anugrah, Z. E., Zakaria, S., & Darmawan, I. (2022). EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KOTA BEKASI TAHUN 2020. *JANITRA (JURNAL ADMINISTRASI PEMERINTAHAN)*, 2(1).
3. Awaludin, L. (2019). Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (Tik) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe). *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 118–134. <https://doi.org/10.23969/paradigmopolistaat.v2i2.2115>
4. Aziz, F. N., Mubin, F., Hidayat, R. J. P., Nurjaman, A., Romadhan, A. A., Sulistyaningsih, T., & Hijri, Y. S. (2021). Bagaimana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bertransformasi Menjadi Inovasi Pelayanan Publik? *Perspektif*, 10(2), 616–626. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4905>
5. Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). The Evaluation of Electronic Based Government System Using E-Government Maturity Model (Case in Government of Gorontalo City). *Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 23(1), 16–24.

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

---

6. Khaidarmansyah, & Ridwan Saifuddin. (2022). Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Provinsi Lampung. *Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Provinsi Lampung*, 16(1), 1–11.
7. Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 101–112. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2898-Article Text-11413-2-10-20210323.pdf
8. Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.
9. Pratiwi, H. D., Hayuhardhika, W., Putra, N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(11), 4116–4124.
10. Ramli, T. S., & Cahyadini, A. (2019). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM KAITANNYA DENGAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN e-ktp. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 171–177. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.71>
11. Rifan Alun Pratama, Dine Meigawati, A. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sukabumi Particioatory Responder (Super) Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 453. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/5871/pdf>
12. Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
13. Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Goverment dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.438>
14. Supriyanto, S., Ridwan, A., Tamam, R., Santoso, M. I., Satria, D., & Mutaqin, A. I. S. (2021). Perancangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang berkelanjutan di Provinsi Banten. *Journal Industrial Servicess*, 7(1), 171. <https://doi.org/10.36055/12952>
15. Susilo, A. B., Nurhayati, T., & Sa'bani, A. (2019). SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PENDUKUNG PERKEMBANGAN EKOMONI DAERAH KABUPATEN SEMARANG. *Sinov*, 2(1).
16. Syahruni Qotrunnisa, A. (2021). Model Arsitektur Layanan Administrasi Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pemerintah Daerah Kuningan. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 4(3), 187–192. <https://doi.org/10.33387/jiko.v4i3.3424>
17. Tanaamah, A. R., Wijaya, A. F., & Maylinda, S. A. (2021). Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Sektor Publik: Penyelarasan Teknologi Informasi Dengan Visi Kepemimpinan (Studi Kasus: Kota Salatiga dan Kabupaten Bengkayang). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 8(6), 1319. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2021865379>